



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP) TAHUN 2024



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LITBANG**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2023.

Penyusunan LKjIP Bappeda dan Litbang Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang atas pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, Rencana Kerja (RENJA) 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah disusun. LKjIP Tahun 2023 juga merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan RENSTRA, RENJA 2023, Perjanjian Kinerja 2023 dan juga dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Semoga penyusunan LKjIP Bappeda dan Litbang ini dapat mencerminkan kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2023.



Malinau, 20 Maret 2024
Kepala Bappeda dan Litbang

Drs. Agustinus, M.AP
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19670217 199312 1 001



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda dan Litbang ini memberikan gambaran tentang kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau pada tahun 2023. LKjIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai saran yang strategis untuk mengevaluasi dalam rangka peningkatan kinerja di waktu yang akan datang. Dengan langkah ini Bappeda dan Litbang senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

LKjIP memberikan informasi keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta catatan-catatan penting dalam pencapaian sasaran. Selain itu LKjIP ini juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Sesuai APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023 Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau mengelola anggaran sebesar **Rp 17.265.616.066** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp 16.778.811.981** dan Belanja Modal sebesar **Rp 486.804.085**. Belanja operasi digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja modal digunakan belanja modal peralatan dan mesin serta modal aset tetap lainnya. Realisasi anggaran belanja operasi dan modal sebesar **84,88%** dengan penyerapan dana sebesar **Rp 14.655.802.375**. Dari sisi akuntabilitas kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, Bappeda dan Litbang melaksanakan 4 program, 12 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2023 adalah realisasi fisik sebesar **86,83%**.

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau dapat dikategorikan **Sangat Baik** dengan capaian kinerja rata-rata 159,63%.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024

LKjIP 2023 ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.



Malinau, 20 Maret 2024
Kepala Bappeda dan Litbang

Drs. Agustinus, M.AP
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19670217 199312 1001



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vii
Dokumentasi Kegiatan	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Maksud dan Tujuan Laporan.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	1
C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda dan Litbang.....	6
D. Isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1 Rencana Strategis Tahun 2016-2021	10
2.2 Tujuan dan Sasaran	11
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan.....	14
2.5 Program.....	22
2.6 Rencana Kinerja Tahunan	20
2.7 Perjanjian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
B. Analisis Capaian Kinerja	25
C. Realisasi Anggaran	40
BAB IV PENUTUP.....	50



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024*

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Bappeda dan Litbang.....	13
Tabel 2.3	Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan	16
Tabel 2.4	Indikator kinerja utama (IKU) Bappeda dan Litbang	19
Tabel 2.5	Perjanjian kinerja tahun 2023 Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau.....	22
Tabel 3.1	Capaian kinerja Bappeda dan Litbang tahun 2023.....	24
Tabel 3.2	Konsistensi program dalam RKPD kedalam RPJMD tahun berkenaan.....	27
Tabel 3.3	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini Dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	29
Tabel 3.4	Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka panjang Menengah	29
Tabel 3.5	Capaian kinerja dan realisasi keuangan Tahun 2023.....	31
Tabel 3.6	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun Ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	33
Tabel 3.7	Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka panjang Menengah.....	34
Tabel 3.8	Capaian kinerja dan realisasi keuangan Tahun 2023.....	36
Tabel 3.9	Capaian Kinerja SKPD 2023.....	37



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024*

Tabel 3.1	Realisasi Anggaran Bappeda dan Litbang tahun 2023.....	41
Tabel 3.2	capaian kinerja dan anggaran tahun 2023.....	42
Tabel 3.3	Rata-rata capaian kinerja dan anggaran rencana jangka panjang menengah Bappeda dan Litbang TA. 2023	44



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023*

DAFTAR GAMBAR

Bagan Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang.....	5
--	---



BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Bappeda dan Litbang
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Bappeda dan Litbang
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Bappeda dan Litbang
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Bappeda dan Litbang
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Bappeda dan Litbang

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU

4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja OPD

B.1 Kedudukan :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B.2 Tugas :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan, Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU

B.3 Fungsi :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Malinau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang terdiri atas:
 1. Subbagian Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Subbagian Penyusunan Program
- c. Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
 1. Subbidang Pengelolaan Data Spasial
 2. Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
 3. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- d. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
 1. Subbidang Sarana dan Prasarana Wilayah



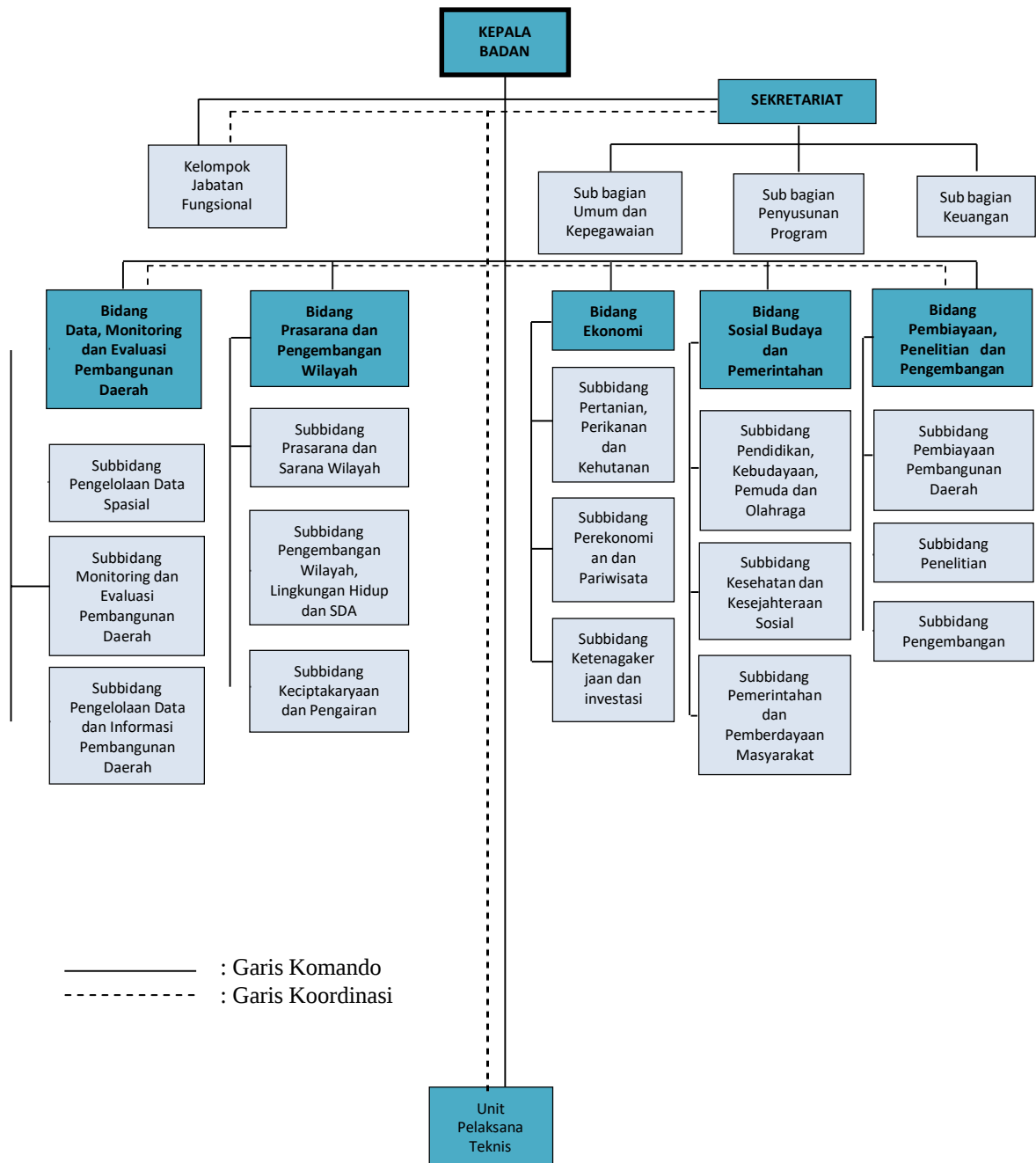
*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU*

2. Subbidang Pengembangan Wilayah, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
3. Subbidang Keciaptakarya dan Pengairan
- e. Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
 1. Subbidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
 2. Subbidang Perekonomian dan Pariwisata
 3. Subbidang Ketenagakerjaan dan Investasi
- f. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas :
 1. Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
 2. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
 3. Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- g. Bidang Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas :
 1. Subbidang Pembiayaan Pembangunan Daerah
 2. Subbidang Penelitian
 3. Subbidang Pengembangan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU





C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda dan Litbang

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana Organisasi Bappeda dan Litbang menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Indikasi dari persoalan tersebut adalah kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini.

Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan sekedar kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda dan Litbang yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan pokok antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU

2. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar (*shortcutting*);
3. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
4. Kompetensi SDM perencana belum optimal;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan;
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
7. Belum lengkapnya *Standar Operating Procedure* (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel;
8. Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencana.
9. Belum optimalnya fungsi penelitian dalam menghasilkan kajian-kajian strategis;
10. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen perencanaan yang dihasilkan Bappeda dan Litbang;
11. Belum terbangunnya sistem informasi data pembangunan;
12. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
13. Belum optimalnya penelaahan usulan masyarakat oleh OPD;
14. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan dengan OPD sehingga terjadi ketidakselarasan *output* dan *outcome* yang dihasilkan;
15. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.



D. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis pada lingkup Internasional, Nasional, Regional termasuk isu daerah. Bappeda dan Litbang sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses *brainstorming* dan *mapping* jenis layanan yang telah dilakukan oleh Bappeda dan Litbang, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Bappeda dan Litbang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
 - Kepatuhan OPD untuk memedomani dokumen perencanaan masih rendah
 - Kesadaran OPD terhadap dokumen perencanaan masih rendah
 - Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur perencana di OPD
 - Kurang memadainya data-data pendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan
2. Belum optimalnya pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - Belum optimalnya sistem informasi perencanaan yang ada
 - Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran
3. Belum optimalnya pencapaian hasil evaluasi pembangunan daerah;
 - Hasil evaluasi kinerja belum dijadikan bahan pertimbangan kebijakan perencanaan berikutnya



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU*

- Monitoring evaluasi yang dilakukan belum maksimal (sebatas laporan realisasi fisik dan keuangan)
- OPD belum memahami secara utuh anggaran berbasis kinerja
- Belum digunakannya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar penyusunan kebijakan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2021-2026 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”**, berbasis pada posisi dan peran Bappeda dan Litbang dalam mendukung pencapaian ***Misi Keempat*** yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau 2021-2026, sehingga misi-misi yang mejadi basis tersebut adalah memantapkan implementasi 5 (lima) program inovasi daerah.

Berdasarkan tujuan dan misi RPJMD di atas, peran Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau yang strategis terdiskripsi secara jelas sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda dan Litbang. Kualitas birokrasi dan pengelolaan pembangunan dijabarkan dalam cara pandang dalam pengelolaan perencanaan pembangunan yang partisipatif, akomodatif, efektif dan efisien. Dengan visi ini diharapkan kualitas pengelolaan pembangunan di Kabupaten Malinau terutama ditinjau dari aspek perencanaan lebih meningkat dan menjadi lebih baik dari waktu sebelumnya.

Adapun langkah yang perlu dilaksanakan untuk mencapai visi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau dengan menentukan misi yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yaitu :

“MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN”



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

Tabel 2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Daerah

Visi :	TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL			
NO	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
	1. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Belum Primanya Tata Kelola Pemerintahan	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Sudah adanya koordinasi yang baik di tingkat RT, Desa dan Kecamatan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musrenbang RT, Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan

1. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Bappeda dan Litbang untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang akan datang yang akan berpengaruh langsung pada tujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang, serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bappeda dan Litbang. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan,



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

serta dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya, selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda dan Litbang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Bappeda dan Litbang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program RKPD kedalam RPJMD tahun berkenaan	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase capaian indicator kinerja kabupaten	80%	85%	90%	95%	100%
			Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan	Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan	80%	85%	90%	95%	100%
				Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah	80%	85%	90%	95%	100%



2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Bappeda mengampu urusan perencanaan pembangunan daerah. Berdasar urusan dan program yang diampu, Bappeda dan Litbang mendukung pencapaian 1 (Satu) misi Kabupaten Malinau yang tercantum pada RPJMD yaitu :

Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel dan Transparan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja utama Bappeda sebanyak 2 (dua) indikator.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

Tabel 2.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA DAN LITBANG

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
SASARAN RPJMD	SASARAN RENSTRA				
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program RKPD kedalam RPJMD tahun berkenaan	$\frac{\text{Jumlah program dalam RKPD}}{\text{Jumlah program dalam RPJMD}} \times 100$	Bidang Litbang, Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi, Bidang PPW, Bidang Data dan Informasi dan Sekretariat Bappeda dan Litbang	Kepala Bidang Litbang
		Persentase capaian indikator kinerja kabupaten	$\frac{\text{Persentase sasaran kinerja dengan capaian 80\% atau lebih}}{\text{Jumlah indikator kinerja}} \times 100$	Bidang Litbang, Bidang Sosial budaya dan pemerintahan, bidang ppw, bidang data dan informasi dan secretariat bappeda dan litbang	Kepala Bidang Data dan Informasi
		Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan	$\frac{\text{Jumlah Inovasi}}{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan inovasi}} \times 100$	Bidang Litbang, Bidang social Budaya dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi, Bidang PPW, Bidang Data dan Informasi dan Sekretariat Bappeda dan litbang	Kepala Bidang Litbang



3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Penjabaran strategi dan kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran renstra Bappeda dan Litbang dijelaskan sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

- i. Meningkatkan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah
- ii. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah
- iii. Meningkatkan kualitas inovasi daerah
- iv. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Bappeda dan Litbang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. kebijakan pembangunan Renstra Bappeda dan Litbang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Bappeda dan Litbang.



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023*

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL
Misi	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas verifikasi dokumen perencanaan PD
			Meningkatkan ketersediaan dan keakuratan data perencanaan
		Meningkatkan pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi program pembangunan
	Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan	Meningkatkan kualitas inovasi daerah	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan inovasi daerah
		Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan	Meningkatkan jumlah pelaksanaan penelitian dan pengembangan



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023*

5. PROGRAM

Pada Tahun Anggran 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Malinau telah menetapkan 4 (Empat) Program Operasional , yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

TABEL 2.4

PROGRAM KEGIATAN BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN 2023

Program/Kegiatan	Anggaran 2023
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.915.474.855
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.633.769.900
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.261.593.670
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.439.827.200
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	480.284.055
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.651.588.910
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.841.590.610
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	125.000.000
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	684.998.600
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.348.562.600
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	923.562.600
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	175.000.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	250.000.000
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	349.989.700
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	99.989.700
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	250.000.000
TOTAL	17.265.616.065



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

B. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Pada Tahun 2023 Rencana Kinerja Tahunan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

RENCANA KERJA TAHUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program RKPD kedalam RPJMD tahun berkenaan	Persentase	100%
		Persentase capaian Indikator Kinerja Kabupaten	Persentase	90%
		Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan	Persentase	90%

C. PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA DAN LITBANG

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Bappeda dan Litbang Tahun 2023 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

terukur dalam waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2023 mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2023 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau pada tahun 2024, secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut :



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023*

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program RKPD kedalam RPJMD tahun berkenaan	100 %
		Persentase capaian indikator kinerja Kabupaten	90%
		Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan	90 %

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.208.406.085	APBD-P
2.	PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 2.560.000.000	APBD
3.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 1.348.563.200	APBD-P
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp. 350.000.000	APBD-P
JUMLAH		Rp. 7.466.969.284	APBD



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang diselenggarakan melalui proses dan tahapan perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Didalam bab ini akan dibahas mengenai Akuntabilitas Kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau yaitu kriteria ukuran keberhasilan kinerja, realisasi sasaran strategis tahun 2023, pengukuran kinerja tahun 2023, analisis keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja, hambatan serta langkah-langkah antisipatif untuk tercapainya target kinerja organisasi. Bab ini juga memuat target dan realisasi kinerja keuangan tahun 2023.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penilaian kinerja pada Bappeda dan Litbang Malinau berpedoman pada Perjanjian Kinerja Beppeda dan Litbang 2023. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Karakteristik indikator kinerja Bappeda dan Litbang bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja lebih dari 100% = sangat baik
- b. Capaian kinerja 75% sampai dengan 100% = baik
- c. Capaian kinerja 55% sampai dengan 74% = cukup
- d. Capaian kinerja kurang dari 55% = kurang



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

Hingga akhir tahun 2023, Bappeda dan Litbang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut:

MENINGKATNYA KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Bappeda dan Litbang Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program RKPD kedalam RPJMD tahun berkenaan	100	96,02	96,02
		Persentase capaian indikator kinerja kabupaten RKPD	90	109,38	121.53
		Persentase inovasi yang telah diimplementasikan	90	108,33	120.36

Penghitungan persentase pencapaian target kinerja menggunakan cara semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ pencapaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \%$$

Penerapan rumus digunakan untuk menghitung persentase capaian pada seluruh indikator. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh *stakeholder* dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk target kinerja yang belum bisa mencapai 100% masih diperlukan upaya pencapaian kinerja yang lebih keras, fokus dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pelaporan Kinerja Bappeda dan Litbang merupakan pertanggungjawaban kepala OPD atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malinau.

1. Persentase konsistensi program RKPD kedalam RPJMD tahun berkenaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urusan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Dalam pengambilan kebijakan, diperlukan data-data perencanaan yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan agar kebijakan yang diambil sesuai untuk dapat menjawab permasalahan utama Kabupaten. Bappeda dan Litbang mempunyai tanggung jawab dalam penyediaan data- data perencanaan yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Data-data/dokumen perencanaan yang menjadi target capaian dan harus ada di Bappeda dan Litbang adalah:

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
3. Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
4. Dokumen Rencana Kerja (Renja)

Pada umumnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Malinau mengalami peningkatan. Setiap OPD wajib menyusun dokumen perencanaan yaitu Renstra dan Renja, dokumen ini



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

merupakan acuan bagi OPD untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran yang akan dilaksanakan, baik itu dalam bentuk usulan lintas sektoral bidang ekonomi, bidang prasarana dan pengembangan wilayah, bidang sosial, budaya dan pemerintahan.

Namun demikian dalam proses penyusunan dokumen rencana kerja OPD di Kabupaten Malinau harus sesuai dengan dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan verifikasi terhadap Renstra dan Renja PD yang disusun agar program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra dan Renja PD sesuai dengan RPJMD dan RKPD.

Sasaran strategis pertama, dengan indikator kinerja yaitu **Persentase konsistensi program RKPD kedalam RPJMD tahun berkenaan**. Untuk mendukung indikator tersebut diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman untuk perangkat daerah untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan dokumen perencanaan tersebut dapat terlaksana melalui kegiatan-kegiatan yang wajib dilaksanakan secara rutin setiap tahun pada Bappeda dan Litbang, adapun kegiatan tersebut yaitu:

1. Pelaksanaan konsultasi publik
2. Koordinasi pelaksanaan forum SKPD/Lintas SKPD
3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
4. Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota

Untuk mencapai target capaian kinerja indikator diperoleh dengan cara membandingkan jumlah program dalam RKPD dengan jumlah program dalam RPJMD, berikut adalah data program dari masing-masing dokumen yang dijadikan sebagai rumus untuk menghitung persentase realisasi indikator.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

Tabel 3.2
Konsistensi Program dalam RKPD kedalam RPJMD tahun berkenaan
2021-2026

No	SKPD	Jumlah Program RKPD	Jumlah Program RPJMD
1	Dinas Pendidikan	4	4
2	Dinas Kesehatan	10	8
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	12	14
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	5
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4	3
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	11	11
8	Dinas Ketahanan Pangan	5	5
9	Dinas Lingkungan Hidup	8	8
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5	5
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	5
12	Dinas Perhubungan	3	3
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	3
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	6
15	Dinas Ketenagakerjaan	7	5
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga	5	4
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6	9
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	4
19	Dinas Perikanan	4	4
20	Dinas Pertanian	7	7
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6	7
22	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2	2
23	Bagian Administrasi Pembangunan	2	3
24	Bagian Ekonomi	2	3
25	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2	3
26	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	2	3
27	Bagian Umum	1	3
28	Bagian Hukum	2	3
29	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2	3
30	Bagian Organisasi	2	3
31	Bagian Tata Pemerintahan	2	3
32	Bagian Perencanaan Keuangan	1	
33	Sekretariat DPRD	2	6
34	Sekretariat Korpri	2	2
35	Kecamatan Malinau Kota	4	4
36	Kecamatan Malinau Utara	5	5
37	Kecamatan Malinau Barat	3	3
38	Kecamatan Mentarang	5	6
39	Kecamatan Mentarang Hulu	6	5
40	Kecamatan Pujungan	4	4
41	Kecamatan Kayan Hilir	2	2
42	Kecamatan Kayan Hulu	4	5
43	Kecamatan Sungai Boh	4	4
44	Kecamatan Bahau Hulu	2	6
45	Kecamatan Kayan Selatan	2	4
46	Kecamatan Sungai Tubu	2	2
47	Kecamatan Malinau Selatan	4	4
48	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	5	5
49	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	2	2
50	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	2	2
51	Inspektorat	3	3
52	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	6	4
53	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	4	4
54	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	6	4
55	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4	3



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

	Total	215	201
--	-------	-----	-----

Sumber Data : RPJMD Perubahan Kab. Malinau Tahun 2021-2026 dan RKPD Kab. Malinau Tahun 2023

Dari tabel diperoleh jumlah program RKPD sebanyak 215 program yang selaras dengan program RPJMD sebanyak 201, maka penghitunganyang digunakan untuk mengetahui **“Persentase konsistensi program RKPD kedalam RPJMD tahun berkenaan”** sebagai berikut:

% Realisasi =	$\frac{\text{Jumlah Program dalam RKPD}}{\text{Jumlah Program RPJMD}}$	× 100
% Realisasi =	$\frac{215}{201}$	× 100
% Realisasi =	106,96	

Persentase realisasi diperoleh 106,96%, maka persentase capaian kinerja dihitung dengan formula sebagai berikut:

% capaian kinerja =	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$	× 100
% capaian kinerja =	$\frac{106,96}{100}$	× 100
% capaian kinerja =	106,96	

Persentase capaian kinerja berdasarkan skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah 106,96% dengan kategori **Sangat Baik**. Adapun data dukung untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah dokumen RKPD Tahun 2023 dan dokumen RPJMD 2021-2026.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan realisasi kinerja tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023*

Tabel 3.3
**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu	Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2023 Vs Tahun
			2022	2023
1	2	3	4	5
Persentase konsistensi program RKPD kedalam RPJMD tahun berkenaan	%	106,96	102,85	96,15

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Panjang
Menengah**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Renstra Tahun	Persentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun
			2026	2026
1	2	3	4	5
Persentase konsistensi program RKPD kedalam RPJMD tahun berkenaan	%	106,96	100	93,49

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor pendukung capaian kinerja adalah:

1. Peran Kepala Bappeda dan Litbang sebagai pemangku sasaran strategis OPD memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda dan Litbang yang mendukung pencapaian sasaran strategis yang pertama yaitu meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

2. Pelaksanaan kegiatan konsultasi publik, forum SKPD dan musrenbang yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang sangat mendukung dalam proses penyusunan dokumen RKPD
3. Adanya keterlibatan jasa tenaga ahli dalam penyusunan dokumen RKPD dan RPJMD sehingga ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat tersedia dan dapat dimanfaatkan dalam penyusunan renja SKPD
4. Koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara SKPD dan Bappeda dan Litbang dalam proses penyusunan dokumen perencanaan
5. Ketersediaan anggaran pada Bappeda dan Litbang mendukung penyusunan dokumen RKPD setiap tahun anggaran

Faktor penghambat capaian kinerja:

1. Rasionalisasi anggaran yang dilakukan sangat mempengaruhi usulan program perangkat daerah karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada
2. Perubahan peraturan dan kebijakan dari pemerintah pusat tentang tata cara penyusunan rencana kerja sehingga ada perbedaan nomenklatur program
3. Keterbatasan APBD Kabupaten Malinau menyebabkan tidak semua program dalam RPJMD terakomodir sehingga disesuaikan dengan program prioritas yang mendukung target capaian kinerja pada masing-masing OPD.

Solusi/rekomendasi perbaikan kinerja:

1. Meningkatkan dan mempertahankan koordinasi dengan para pihak dalam rangka menyamakan persepsi untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan
2. Menyesuaikan target indikator sasaran dengan tujuan agar persentase capaian kinerja dapat tercapai



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

3. Menyusun program sesuai dengan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tahun 2023 agar program dalam RKPD 2023 sesuai dengan RPJMD 2021-2026
4. Melakukan koordinasi dengan pihak akademisi sebagai tenaga ahli dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui program dan kegiatan serta sub kegiatan pada Bappeda dan Litbang

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program RKPD kedalam PJMD tahun berkenaan	106,96	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	84,43%
			1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja didukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2023 capaian kinerja pelaksanaan program adalah **106,96%**.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

Untuk mendukung capaian indikator kinerja dilaksanakan dengan

1 (Satu) program yaitu :

1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Pagu anggaran dari 1 program diatas adalah **Rp 2.560.000.000** dan terealisasi sebesar **Rp 2.308.555.401.000 (80,36%)** sehingga terdapat efisiensi anggaran **19,64%**.

Dalam proses pembangunan, setiap Pemerintah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan pesatnya pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta prasarana dan pengembangan wilayah di Kabupaten Malinau, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai ketingkat Kabupaten/Kota, data dan indikator yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran tersebut juga mempengaruhi capaian target kinerja organisasi, dengan kata lain bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan tingkat capaian yang semakin baik.

Pada bagian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran pembangunan daerah serta capaian kinerja Bappeda dan Litbang melalui pencapaian indikator kinerja, karena perencanaan dan penganggaran di SKPD sangat berkontribusi terhadap suksesnya perencanaan dan penganggaran di daerah.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023



Gambar 1. Rapat persiapan penyusunan RKPD

2. Persentase capaian indikator kinerja kabupaten

Sasaran Strategis pertama, dengan indikator kedua yaitu **Persentase capaian indikator kinerja kabupaten** untuk mencapai tingkat capaian kinerja kabupaten Bappeda dan Litbang melakukan peningkatan sistem pengendalian melalui evaluasi kinerja IKU OPD terhadap dokumen indikator kinerja Utama (OPD) pertriwulan oleh bidang-bidang perencana Bappeda dan Litbang. Adapun dokumen perencanaan yang dievaluasi yaitu dokumen Renstra, Renja dan IKU.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu	Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2023 Vs Tahun 2022
			2022	2022
1	2	3	4	5
Persentase indikator kinerja kabupaten	%	106,69	169,44	158,81

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut:



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023*

Tabel 3.7
**Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka panjang
menengah**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Renstra Tahun	Persentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun
			2026	2026
1	2	3	4	5
Persentase indikator kinerja Kabupaten	%	106,96	100	93,49

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
--

Faktor-faktor pendukung capaian kinerja adalah:

1. Ketersediaan dokumen RPJMD Perubahan 2021-2026 dan RKPD 2023 yang update
2. Konsistensi terhadap RKPD 2023 sebagai pedoman penyusunan rencana kerja 2023 menyebabkan program dan kegiatan yang diakomodir pada APBD tidak lebih dari program dan kegiatan yang ada pada dokumen RKPD 2023
3. Ketersedian aplikasi SIPD oleh Kemendagri sebagai faktor pendukung capaian karena proses penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pada aplikasi tersebut sudah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD
4. Koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah terlaksana dengan baik melalui kegiatan asistensi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah
5. Ketersediaan anggaran pada Bappeda dan Litbang sehingga dapat melaksanakan kegiatan yang mendukung sasaran strategis kedua dengan melaksanakan asistensi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang di Bappeda dan Litbang
6. Komitmen keterlibatan partisipasi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka memberikan informasi terkait capaian kinerja setiap



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

tahunnya

Faktor penghambat capaian kinerja:

1. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran tidak dapat dijadikan sebagai data jumlah kegiatan yang diakomodir dan dilaksanakan pada APBD Kabupaten Malinau TA. 2023 sehingga berpengaruh kepada target capaian kinerja tahun 2023

Solusi/rekomendasi perbaikan kinerja:

1. Dalam rangka meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau direkomendasikan untuk meningkatkan intensitas informasi dan komunikasi dengan pemerintah yang lebih tinggi, meningkatkan kualitas SDM/pejabat perencana dalam membuat setiap kegiatan yang diajukan, meningkatkan pengetahuan aparatur yang terkait dalam penyusunan anggaran serta meningkatkan komitmen dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023*

Tabel 3.8
Capaian kinerja dan realisasi keuangan tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase indikator kinerja kabupaten	109,38	1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	83,73%
			1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja kedua didukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2023 capaian kinerja pelaksanaan program adalah 109,38%.

Untuk mendukung capaian indikator kedua dilaksanakan dengan 1 (satu) program yaitu:

1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pagu anggaran dari 1 program diatas adalah **Rp 1.348.563.200** dan terealisasi sebesar **Rp 976.320.880 (83,73%)** sehingga terdapat efisiensi anggaran **16,27%**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

Sasaran strategis Pertama, dengan indikator kinerja kedua yaitu **Persentase capaian indikator kinerja Kabupaten**, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian terhadap dokumen pembangunan dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja masing-masing program OPD. Capaian kinerja perangkat daerah yang dievaluasi tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian kinerja SKPD 2023

A	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	REALISASI ANGGARAN	
		PERSENTASE	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	
1	Kecamatan Bahau Hulu	98,36	ST
2	Kecamatan Malinau Kota	97,86	ST
3	Kecamatan Kayan Selatan (LONG AMPUNG)	97,80	ST
4	Kecamatan Sungai Tubu	96,94	ST
5	Kecamatan Sungai Boh (MAHAK BARU)	96,63	ST
6	Dinas Perhubungan	96,21	ST
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95,59	ST
8	Kecamatan Mentarang (PULAU SAPI)	95,51	ST
9	Kecamatan Kayan Hilir (DATA DIAN)	95,44	ST
10	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	95,35	ST
11	Kecamatan Malinau Selatan (LOREH)	95,19	ST
12	Dinas Perikanan	94,85	ST
13	Kecamatan Kayan Hulu (LONG NAWANG)	94,65	ST
14	Kecamatan Malinau Utara	94,61	ST
15	Kecamatan Pujungan	94,13	ST
16	Kecamatan Malinau Selatan Hulu (METUT)	93,64	ST
17	Kecamatan Mentarang Hulu	91,46	ST
18	Sekretariat DPRD	90,88	ST
19	Dinas Lingkungan Hidup	90,72	ST
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	90,61	ST
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90,23	ST
22	RSUD	91,00	ST
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	89,95	T
24	Kecamatan Malinau Barat	89,91	T
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	89,84	T
26	Sekretariat Daerah	89,28	T
27	Dinas Ketenagakerjaan	87,93	T
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	87,92	T
29	Dinas Ketahanan Pangan	87,89	T
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	87,71	T
31	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	85,05	T
32	Dinas Komunikasi dan Informatika	83,94	T
33	Kecamatan Malinau Selatan Hilir (SETARAP)	83,58	T
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	81,98	T
35	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	80,04	T
36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	79,31	T
37	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	77,46	T
38	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	74,42	S
39	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	71,57	S
40	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	69,92	S
41	Dinas Pertanian	66,50	S



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

42	Badan Pengelola Perbatasan Daerah		60,28	R
43	Inspektorat		51,42	R
44	Dinas Pendidikan		46,51	R

Sumber Data : Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan IV, Bidang Data dan Informasi, Bappeda dan Litbang 2023

Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi laporan evaluasi renja triwulan IV sebanyak 44 OPD terhadap capaian kinerjanya dan diperoleh OPD yang mendapat predikat kinerja sangat tinggi (ST) dan tinggi (T) sehingga dalam penghitungan "**Persentase capaian target kinerja SKPD**" digunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Jumlah OPD yang memperoleh nilai sangat tinggi}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{35}{44} \times 100$$

$$\% \text{ Realisasi} = 79,54$$

Persentase realisasi evaluasi kinerja dari 35 OPD yang mencapai predikat kinerja sangat tinggi dan tinggi diperoleh 79,54%, maka capaian kinerja adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{79,54}{100} \times 100$$

$$\% \text{ capaian kinerja} = 79,54$$

Persentase tingkat capaian kinerja pada indikator kedua yaitu 79,54% dengan kategori **Baik**. Adapun data dukung untuk pencapaian indikator kedua ini adalah data evaluasi renja perangkat daerah dan Laporan Evaluasi IKU triwulan IV tahun anggaran 2023.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023



Gambar 2. Rapat Evaluasi Capaian Indikator Kinerja OPD Tahun 2023

c. Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia
2. Efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023 realisasi anggaran untuk semua program diatas adalah Rp.14.577.722.675,- sementara target anggaran untuk semua program yaitu Rp. 17.265.616.066,- Dengan rumus efisiensi di atas diperoleh persentase efisiensi anggaran pada kisaran 84.43 %. Persentase efisiensi ini dapat diasumsikan pada tahun 2023 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumberdaya anggaran.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran pekerjaan untuk mencapai target kinerja, sehingga dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023 APBD-P Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau sebesar Rp 17.265.616.066 dengan uraian belanja operasi sebesar Rp 16.876.811.981 dan belanja modal sebesar Rp 386.804.085 adapun realisasi belanja operasi Rp 14.225.222.675 (84,28%) dan belanja modal Rp. 352.500.000 (91,13%)

Tabel 3.1
Realisasi Anggaran Bappeda dan Litbang Tahun 2023

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	16.876.811.981	14.225.222.675	84,28
2	Belanja Modal	386.804.085	352.500.000	91,13
Total		17.265.616.066	14.930.222.675	129,2

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023*

Tabel 3.2

Pencapaian kinerja dan anggaran tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan (%)	Kinerja			Program/Kegiatan	Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			%	100	100	100	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 1. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah 2. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah 3. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 4. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12.195.474.855	11.024.292.054	85,35
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan	Persentase konsistensi program RKPD kedalam RPJMD tahun berkenaan	%	100	100	100	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2.560.000.000	2.308.555.401	87,06



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023*

	daerah						1. Kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan 2. Kegiatan analisis data dan informasi pemeritahan daerah bidang perencanaan pemabngunan manusia			
		Persentase capaian indicator kinerja kabupaten	%	80	100	100	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 1. Kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 2. Kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3. Kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	1.328.562.600	958.470.880	72,14



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024*

Tabel 3.3
Rata-rata capaian kinerja dan anggaran rencana jangka panjang menengah Bappeda dan Litbang TA. 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program dalam RKPD kedalam RPJMD tahun berkenaan	100	96,02	96,02
		Persentase capaian indicator kinerja kabupaten	85	109,38	109,38
		Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan	85	108,33	108,33
Rata-rata Pencapaian Kinerja					104.57



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024*

Tabel 3.4

**Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah bappeda dan litbang untuk
tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2023**

Program/Kegiatan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.915.474.855	11.024.292.054	85.36
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.633.769.900	8.679.448.282	90.10
Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.331.000	127.646.500	84.91
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	480.284.055	399.250.000	89.55
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000	97.500.000	100.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000	92.297.000	92.30
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.261.593.670	762.159.241	60.41
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.000.000	82.338.000	91.48
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.099.496.200	783.653.031	71.27
PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.651.588.910	2.308.555.401	87.06
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	99.998.310	79.506.000	79.51
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	75.000.000	38.503.901	52.47
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	50.000.000	31.324.000	79.72
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	684.998.600	625.384.783	97.07



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024*

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.091.592.000	932.340.247	89.23
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	150.000.000	130.439.670	96.96
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.348.562.600	978.320.880	72.55
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	20.000.000	19.850.000	99.25
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	903.562.600	609.059.480	89.03
Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	175.000.000	164.010.800	94.88
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	250.000.000	185.400.600	98.44
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	349.989.700	266.554.340	76.16
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	99.989.700	78.255.000	78.27
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	250.000.000	188.299.340	75.73
TOTAL	17.265.616.065	14.577.722.675	84.43



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau pada tahun anggaran 2023 telah menyelesaikan program dan kegiatan yang ditetapkan dengan nilai rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 104,57 % sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dan realisasi anggaran pada tahun anggaran 2023 Bappeda dan Litbang mencapai **84,43%** dan masuk dalam kategori **Sangat Baik**.

LKjIP Bappeda dan Litbang tahun 2023 juga menyajikan data perbandingan capaian kinerja di tahun 2022 dengan tahun 2023 serta tingkat capaian atas target akhir Renstra Bappeda dan Litbang Tahun 2021-2026. Data perbandingan capaian kinerja yang disajikan dapat menunjukkan apakah kinerja Bappeda dan Litbang setiap tahunnya mengalami peningkatan ataupun penurunan.

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara umum dapat diatasi dengan dukungan potensi dan kemampuan organisasi yang ada. Keberhasilan yang telah dicapai tetap harus selalu dievaluasi karena seiring dengan berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi akan berbeda. Untuk itu sikap taktis dan responsif harus terus menerus dikembangkan. Dukungan masyarakat dan kerjasama instansi terkait juga harus bisa dimanfaatkan guna memacu kinerja instansi.

B. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kinerja Bappeda dan Litbang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan intensitas informasi dan komunikasi dengan pemerintah yang lebih tinggi, meningkatkan kualitas SDM/pejabat perencana dalam membuat setiap kegiatan yang diajukan, meningkatkan pengetahuan

aparatur yang terkait dalam penyusunan anggaran serta meningkatkan komitmen dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

2. Meningkatkan dan mempertahankan koordinasi dengan para pihak dalam rangka menyamakan persepsi untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak akademisi sebagai tenaga ahli dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui program dan kegiatan serta sub kegiatan pada Bappeda dan Litbang.
4. Menyusun program sesuai dengan Kepmendagri 050 tahun 2021 agar program dalam RKPD 2023 sesuai dengan RPJMD 2021-2026.

C. TINDAK LANJUT

Untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat, maka Bappeda dan Litbang telah melakukan perbaikan-perbaikan terhadap dokumen-dokumen SAKIP.

Kami berharap Laporan Kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2023 dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, dan semoga bermanfaat untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.



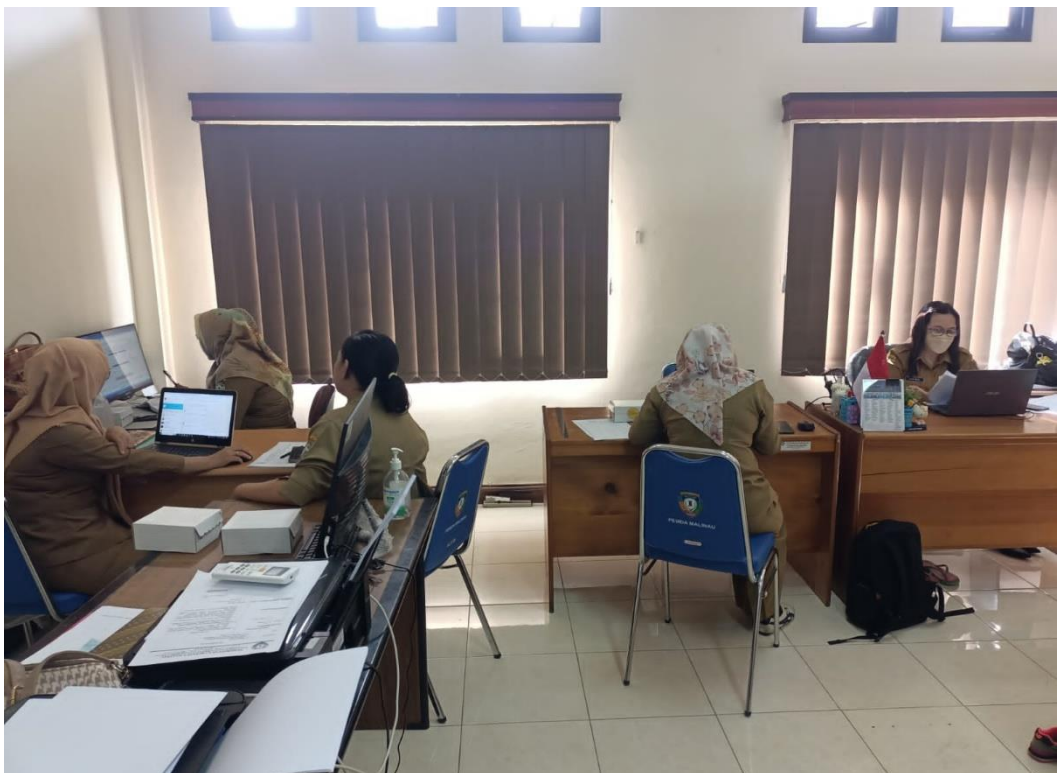
Malinau, 20 Maret 2024

Kepala Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau

Drs. Agustinus, M.AP

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670217 199312 1 001

**LAMPIRAN DOKUMENTASI
KEGIATANTAHUN 2023**



EVALUASI CAPAIAN KINERJA OPD



Evaluasi Laporan Kinerja Triwulan OPD



PENDAMPINGAN SAKIP OPD TAHUN 2022

LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN
TAHUN 2022



RAPAT EVALUASI KINERJA OPD

